

DOI: <https://doi.org/10.31933/jimt.v5i6>

Received: 03 Agustus 2024, Revised: 09 Agustus 2024, Publish: 14 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Nora Sinaga<sup>1</sup>, Risni Nelvia<sup>2</sup>, Sri Wineh<sup>3</sup>, Gita Suliska<sup>4</sup>, Rd. Ade Tribuana Anjaya<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muaro Bungo, Jambi, Indonesia, [Norasinaga@gmail.com](mailto:Norasinaga@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muaro Bungo, Jambi, Indonesia, [risni.nelvia@gmail.com](mailto:risni.nelvia@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muaro Bungo, Jambi, Indonesia, [sriwineh0205@gmail.com](mailto:sriwineh0205@gmail.com)

<sup>4</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muaro Bungo, Jambi, Indonesia, [gita\\_sulistika@yahoo.co.id](mailto:gita_sulistika@yahoo.co.id)

<sup>5</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muaro Bungo, Jambi, Indonesia, [adetribuana78@gmail.com](mailto:adetribuana78@gmail.com)

Corresponding Author: [Norasinaga@gmail.com](mailto:Norasinaga@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research aims to determine the effect of regional taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management, and other legal PAD on economic growth in districts/cities in Jambi Province in 2018-2022. This type of research is quantitative research where the dependent variable used is economic growth and the independent variables used in this research are regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management, and other legitimate PAD. The data in this research comes from the Regency/City Central Statistics Agency (BPS) in Jambi Province. The data analysis used is panel data regression analysis. The cross section data in the research are 11 districts/cities in Jambi Province, while the time series data in this research is from 2018 to 2022 where the sample used is a saturated sample. All data used was processed using a computer statistical program, namely E-Views 13, for testing. Based on simultaneous tests, it was found that regional taxes, regional levies, results of separate regional wealth management and other legal PAD simultaneously had a significant effect on economic growth in districts/cities in Jambi Province in 2018-2022. Based on the partial test, research results were found which showed that regional levies and the results of regional wealth management which were separated partially had an effect on economic growth in districts/cities in Jambi Province, while regional taxes and other legitimate PAD partially had no effect on economic growth.*

**Keyword:** *Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Results, Other Legitimate PAD, Economic Growth.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap

pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif Dimana variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Data pada penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Data cross section pada penelitian adalah 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi sedangkan data time series pada penelitian ini adalah tahun 2018 sampai dengan 2022 dimana sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Seluruh data yang digunakan diolah menggunakan program statistik komputer yaitu E-Views 13 untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan uji simultan, ditemukan hasil bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022. Berdasarkan uji parsial, ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara signifikan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Pertumbuhan Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki luas wilayah yang sangat besar. Permasalahan konflik disintegrasi membuat Indonesia mengubah pemerintahan sentralis menjadi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam hal ini Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya masing-masing. Dengan berlakunya Otonomi Daerah kini telah banyak mendorong perubahan baik lingkungan ekonomi, sosial maupun politik. Undang-Undang yang mengatur tentang pendapatan asli daerah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Menurut Todaro dan Smith (2006), pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup mereka, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses kegiatan ekonomi dan sosial dalam kehidupan mereka. Pembangunan melibatkan upaya untuk mendorong perubahan dalam perekonomian, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan memerangi kemiskinan. Salah satu cara mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat juga mencerminkan kesuksesan yang telah dicapai dalam aktivitas yang dilakukan oleh sektor-sektor dalam perekonomian. Menurut Brata (2004), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Provinsi Jambi merupakan provinsi yang memiliki berbagai potensi yang dihasilkan dari daerah kabupaten/kota yang dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor yang ada. Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dengan total luas wilayah sebesar 53.435,72 km<sup>2</sup> dengan total penduduk mencapai 3.679.200 jiwa pada pertengahan tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul niat penulis untuk meneliti tentang teori diatas dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi itu dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi dan menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara/daerah dengan melihat persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. (Arsyad, 2010). Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi, dimana pada penelitian ini digunakan teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital (modal), kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Modal yang dimaksud pada penelitian ini adalah besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusi terpenting dilakukan oleh Solow dan Swan yang menitikberatkan pentingnya pembentukan tabungan dan modal untuk pembangunan ekonomi serta sumber-sumber pertumbuhan suatu negara.

### **Pajak Daerah**

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, Pajak daerah merupakan pembayaran yang wajib diberikan kepada pemerintah daerah oleh individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum tanpa imbalan langsung, dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat.

### **Retribusi Daerah**

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, Retribusi Daerah adalah uang yang dibayar kepada pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin yang telah diberikan, untuk kepentingan individu atau badan.

### **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

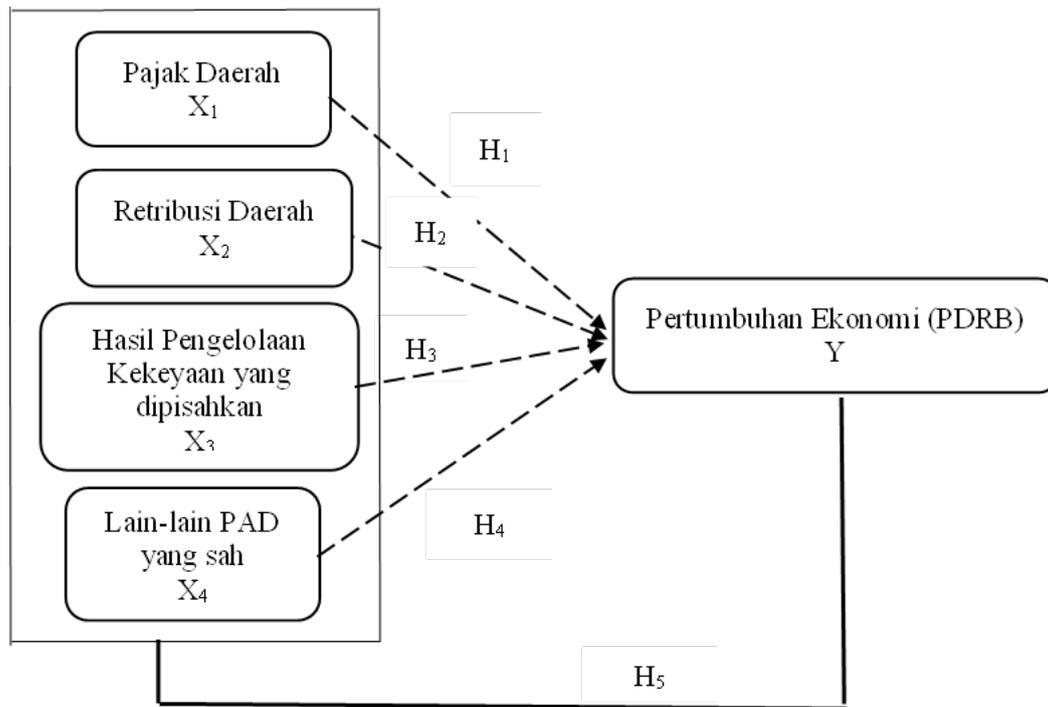
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

### **Lain-lain PAD yang Sah**

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

### **Kerangka Konseptual**

Penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel independen yaitu pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ), dan Lain-lain PAD yang sah ( $X_4$ ) serta variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ). Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

**Hipotesis**

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Mardiasmo (2018) menjelaskan, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. pajak daerah yang semakin tinggi akan dapat mempengaruhi semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pajak daerah memiliki peranan penting dalam menentukan besarnya jumlah output yang dihasilkan. Pajak daerah digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan sehingga akan merangsang kegiatan ekonomi dan akan menghasilkan output berupa barang maupun jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

H<sub>1</sub>: Diduga Pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

**Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hubungan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi juga dijelaskan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Husna dan Sofia (2013), bahwa retribusi daerah yang semakin tinggi akan dapat mempengaruhi semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dikarenakan retribusi daerah akan digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan sehingga akan merangsang kegiatan ekonomi dan akan menghasilkan output berupa barang maupun jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

H<sub>2</sub>: Diduga Retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

**Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba Perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik.

H<sub>3</sub>: Diduga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

### **Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bertujuan memberi peluang bagi daerah untuk memperoleh pendapatan dan pinjaman daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah, maka akan semakin meningkatkan perputaran ekonomi daerah sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan.

H<sub>4</sub>: Diduga Lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

### **Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, (Tambunan, 2006).

H<sub>5</sub>: Diduga pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dimana pengumpulan data berbentuk angka-angka dan hasil penelitian dianalisis menggunakan perhitungan statistik. Data penelitian menggunakan data sekunder yaitu laporan PDRB dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang didapat dari situs resmi Badan Pusat Statistik Jambi dan buku Kabupaten/Kota Dalam Angka. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dan jenis data tersebut termasuk dalam data panel (*pooled data*) yaitu gabungan antara *time series* dan *cross section data*. *Time series* sebanyak 5 tahun dari tahun 2018 sampai 2022 dan *cross section data* sebanyak 11 sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 55. Adapun aplikasi statistik yang digunakan adalah Eviews 13. Uji yang akan digunakan adalah uji T, uji F dan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Deskriptif**

**Tabel 1 . Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Milyaran Rupiah)**

	Y	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>
Mean	12.602.08	46.193.36	7.377.200	8.483.873	53.709.44
Median	11.148.00	23.314.00	3.017.000	8.774.000	51.561.00
Maksimum	31.867.00	301.796.0	51.844.00	11.845.00	142.110.00
Minimum	4.280.000	7.265.000	1.174.000	4.408.000	9.553.000
Observations	55	55	55	55	55

Berdasarkan tabel 1 tentang deskriptif statistik data penelitian, jumlah sampel yang diteliti sebanyak 55 (lima puluh lima). Variabel pertumbuhan ekonomi sebagai Y dari tahun 2018-2022 mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 12,602 milyar rupiah. Adapun nilai tengahnya (*median*) sebesar 11,148 milyar rupiah. Nilai tertinggi dari pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 31,867 milyar ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 , sedangkan nilai terendahnya adalah sebesar 4,280 milyar rupiah ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021.

Pajak daerah mempunyai rata-rata sebesar 46,193 milyar rupiah dengan nilai tengah (*median*) sebesar 23,314 milyar rupiah. Adapun nilai tertinggi dari pajak daerah adalah sebesar 301,796 milyar rupiah ada di Kota Jambi Tahun 2022 dan nilai terendahnya sebesar 7,265 milyar rupiah ada di Kabupaten Sungai Penuh Tahun 2020.

Retribusi daerah memiliki rata-rata 7,377 milyar rupiah dengan nilai Tengah (*median*) nya yaitu 3,017 milyar rupiah. Pendapatan tertinggi dari retribusi daerah adalah 51,844 milyar rupiah ada di Kota Jambi Tahun 2021 sedangkan pendapatan terendahnya adalah 1,174 milyar rupiah ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki rata-rata sebesar 8,483 milyar rupiah dengan nilai tengahnya sebesar 8,774 milyar rupiah. Adapun nilai tertinggi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 11,845 milyar rupiah ada di Kabupaten Sungai Penuh Tahun 2022, sedangkan nilai terendahnya adalah sebesar 4,408 milyar rupiah ada di Kabupaten Bungo Tahun 2018.

Lain-lain PAD yang sah memiliki rata-rata sebesar 53,709 milyar rupiah dengan nilai tengahnya sebesar 51,561 milyar rupiah. Adapun nilai tertinggi dari pendapatan lain-lain PAD yang sah adalah sebesar 142,110 milyar rupiah ada di Kabupaten Bungo Tahun 2021, sedangkan nilai terendahnya adalah sebesar 9,553 milyar rupiah ada di Kabupaten Sungai Penuh Tahun 2020.

## ANALISIS REGRESI DATA PANEL

### Uji Goodness Fit Model

#### Uji Chow

**Tabel 2. Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	613.060313	(10,40)	0.0000
Cross-section Chi-square	277.126983	10	0.0000

Berdasarkan hasil uji Chow, diketahui nilai probabilitas adalah sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , maka kesimpulannya adalah *fixed effect model* yang terpilih.

#### Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.085119	4	0.1929

Berdasarkan hasil uji Hausman, diketahui nilai probabilitas adalah sebesar 0,1929 atau lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka kesimpulannya adalah *random effect model* yang terpilih.

### Model Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model*

**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Data Panel**

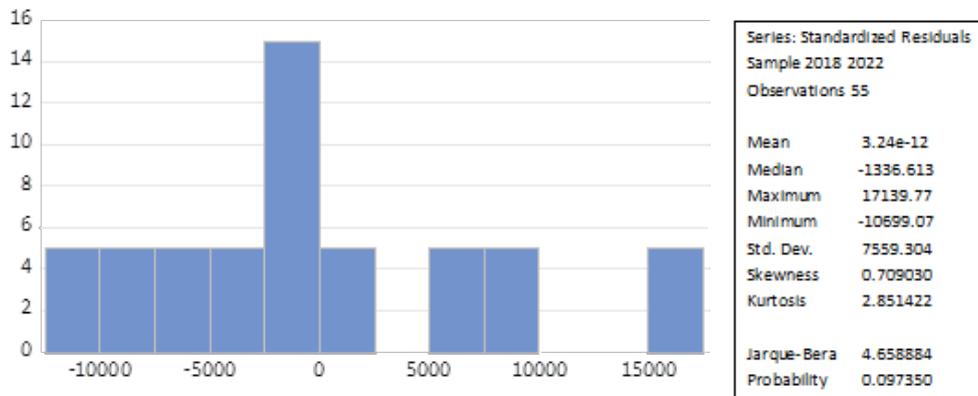
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16843.54	5222.202	3.225372	0.0022
LOG(X1)	-292.3268	388.5800	-0.752295	0.4554
LOG(X2)	-723.7424	313.7394	-2.306826	0.0252
X3	0.587604	0.094864	6.194145	0.0000
X4	-0.003712	0.004453	-0.833485	0.4085

Adapun persamaan regresi data panel dengan menggunakan *random effect model* adalah sebagai berikut :

$$Y = 16.843,54 - 292,33 \text{ Log}(X_1) - 723,74 \text{ Log}(X_2) + 0,59 X_3 - 0,004 X_4 + \epsilon$$

Dimana Konstanta sebesar 16.843,54 menunjukkan bahwa jika variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) adalah nol, maka pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 16.843,54. Koefisien regresi  $X_1$  (pajak daerah) sebesar -292,33, artinya setiap kenaikan pajak daerah 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 292,33%. Koefisien regresi  $X_2$  (retribusi daerah) sebesar -723,74, artinya setiap kenaikan retribusi daerah 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 723,74 %. koefisien regresi  $X_3$  (hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) sebesar 0,59, artinya setiap kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,59 %. Koefisien regresi  $X_4$  (lain-lain PAD yang sah) sebesar -0,004, artinya setiap kenaikan lain-lain PAD yang sah 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,004 %.

### Uji Normalitas



Berdasarkan gambar hasil uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,097350 dimana nilai ini lebih besar (>) daripada alpha 0,05 artinya residualnya berdistribusi normal.

### UJI HETEROKEDASITAS

Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS). Apabila model terbaik yang terpilih adalah *Random Effect Model* maka uji heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada *Random Effect Model* telah menggunakan metode GLS (Widarjono, 2018).

## UJI AUTOKORELASI

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.412781	Mean dependent var	534.4458
Adjusted R-squared	0.365803	S.D. dependent var	725.8858
S.E. of regression	578.0700	Sum squared resid	16708245
F-statistic	8.786761	Durbin-Watson stat	0.835803
Prob(F-statistic)	0.000019		

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji autokorelasi diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson Statistik sebesar 0,835803 artinya tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada diantara - 2 dan +2 atau  $-2 < DW < +2$ .

## UJI MULTIKOLINEARITAS

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.07E+08	216.5036	NA
LOGX1	2855981.	610.6634	4.178482
LOGX2	2201672.	312.4507	3.531660
X3	0.138481	21.22754	1.085104
X4	0.000927	6.831165	1.425973

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji multikolinearitas, didapat nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih besar dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas.

## HASIL UJI HIPOTESIS UJI PARSIAL (UJI T)

**Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16843.54	5222.202	3.225372	0.0022
LOG(X1)	-292.3268	388.5800	-0.752295	0.4554
LOG(X2)	-723.7424	313.7394	-2.306826	0.0252
X3	0.587604	0.094864	6.194145	0.0000
X4	-0.003712	0.004453	-0.833485	0.4085

Hasil menunjukkan bahwa hasil uji t diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, nilai probabilitas pajak daerah adalah sebesar 0,4554 atau lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sehingga hipotesis  $H_1$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bella Chintya Edwin (2014) dan Sulistia S (2022) yang juga menyatakan jika penerimaan pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, nilai probabilitas retribusi daerah adalah sebesar 0,0252 atau lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -723,7424 sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sehingga hipotesis  $H_2$  diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sufardi (2019) dan Ivo Mochamad Enggano (2023) yang juga menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 3. Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, nilai probabilitas hasil kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 0,0000 atau lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,587604 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sehingga hipotesis  $H_3$  diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ivo Mochamad Enggano (2023), Indra (2019), dan Rossi (2023) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 4. Pengaruh Lain-lain PAD yang sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, nilai probabilitas lain-lain PAD yang sah adalah sebesar 0,4085 atau lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sehingga hipotesis  $H_4$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bella Chintya Edwin (2014) serta Aenun Siri dan Muhammad Ridwan (2022) yang menyatakan jika penerimaan lain-lain PAD yang sah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## UJI SIMULTAN (UJI F)

**Tabel 6.** Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.412781	Mean dependent var	534.4458
Adjusted R-squared	0.365803	S.D. dependent var	725.8858
S.E. of regression	578.0700	Sum squared resid	16708245
F-statistic	8.786761	Durbin-Watson stat	0.835803
Prob(F-statistic)	0.000019		

Berdasarkan tabel 6 dilihat dari nilai signifikansi probabilitasnya sebesar 0,000019, maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara simultan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sehingga hipotesis ( $H_5$ ) diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahdan Abdul Haris Siregar (2023) dan Ivo Mochamad Enggano (2023) yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI ( $R^2$ )

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R-squared	0.412781	Mean dependent var	534.4458
Adjusted R-squared	0.365803	S.D. dependent var	725.8858
S.E. of regression	578.0700	Sum squared resid	16708245
F-statistic	8.786761	Durbin-Watson stat	0.835803
Prob(F-statistic)	0.000019		

Berdasarkan tabel 7 diatas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,365803 atau 37%. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa kontribusi variabel pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ) dan lain-lain PAD yang sah ( $X_4$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 37% sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka didapat Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Edwin, Bella Chintya. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BumD Dan Lain-Lain Pad Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Tahun 2000-2012*. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Enggano, Ivo Mochamad. 2023. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Dan Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Atau Kota Di Jawa Tengah Ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung*. *Skripsi*. Universitas Semarang.
- Husna, A. Dan Sofia, M. (2013). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*, *Jurnal JEMI*, 4(2), 1-12.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinta Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2015. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2022. Sekretaris Negara. Jakarta.
- S, Sulistia. 2022. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo*. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Siregar, Syahdan Abdul Haris. 2023. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021*. *Journal Of Development Economic and Social Studies*.
- Siri, Aenun., & Muhammad Ridwan. 2022. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-Lain yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3).
- Sufardi. 2019. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai ditinjau dari Faktor Pajak dan Retribusi Daerah*. *Journal Of Manejement dan Bisnis*.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. [www.kardin-indonesia.or.id](http://www.kardin-indonesia.or.id)
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
- Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.